

**PELAKSANAAN TUPOKSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAMPAR TERHADAP DAERAH ALIRAN SUNGAI
TAHUN 2013**

Oleh:

Andy Ansyari

(andyansyari@gmail.com)

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Panam Pekanbaru
28293 – Telp/Fax 0761-63277

Abstract

Environment Agency Kampar district is formed through Government Regulation No. 06 of 2008 concerning the organizational structure and working procedures of the area, where local regulations Kampar district number 28 of 2009 on licensing and services business recommendations and / or environmental activities. With regard to environmental sustainability, in Law No. 32 of 2004 on Regional Governance in the 22K article described in organizing autonomous region has an obligation to preserve the environment , so that the existence of the Environment Agency is able to realize the Kampar District Environmental Protection and Management of Quality in the Context of Sustainable Development Environmental Support.

In this study the authors use the theory proposed by R. Terry (2004:7) there are four things that a basic principle in management, namely planning, organizing, actuating and controlling. The method that I use in this study is the reduction method, namely the collection of field data from various sources and then processed into ingredients in the explanation/description of the problems studied. Description, namely the exposure results of research conducted in the field in the form of matter, phenomena and concrete data. Conclusion, ie withdrawal of a general viewpoint based on issues that have been presented . From the results of research on the implementation of the duties of the Environment Agency on the Kampar river basin in 2013 is not consistent with the goals and targets set, this is caused by the ability of employees, lack of financial support from local governments, and the lack of adequate facilities and infrastructure at the Environment Agency life Kampar district, resulting in maximal execution of duties and functions of the Environment Agency Kampar district.

Keyword : BLH, TUPOKSI, Organisasi dan Manajemen

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip Otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tentunya dipengaruhi oleh administrasi yang dijalankan oleh daerah tersebut, dimana pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan di daerah, diperlukan kerjasama semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan disekitarnya.

Sehubungan dengan kelestarian lingkungan, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 22K dijelaskan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana daerah di bidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki Visi yaitu Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

Berkualitas dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Adapun Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Kemampuan aparatur serta Prasarana dan Sarana dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi,

- rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup
2. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga memiliki fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup
2. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup
3. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan
4. Memberikan rekomendasi dan atau Ramah Lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan
5. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup
6. Penyusunan rencana kerja
7. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati Kampar
9. Dalam upaya menjalankan visi misi serta melaksanakan tupoksi tersebut,

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

2. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan
3. Bidang Pemulihan Lingkungan
4. Bidang Pemantauan Lingkungan

Dalam pengendalian dan pelestarian daerah aliran sungai, bidang yang berwenang yaitu, Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Bidang Pemantauan Lingkungan. Adapun kewenangan Bidang yaitu :

1. Melakukan pengujian sampel secara priodik tentang baku mutu air sungai
2. Menetapkan kelas kualitas sungai
3. Hasil dari uji sampel direkomendasikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manusia (Sumber Daya Manusia)
2. Peralatan (Sarana dan Prasarana)
3. Dana/Keuangan (Sumber Dana)

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain,

dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Menyadari hal tersebut Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. sehingga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Dari dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yang melintasi Kabupaten Kampar, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter dan Sungai Siak atau biasa juga disebut dengan Sungai Tapung bagian hulu dengan panjang ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Adapun beberapa titik di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan yaitu di daerah XIII Koto Kampar, yang mana pada daerah tersebut banyak kegiatan perikanan keramba apung yang telah melebihi kapasitas sungai. Adapun kapasitas sungai untuk mendirikan keramba apung sebanyak 1.200 namun dalam kenyataannya terdapat lebih dari 3.000 keramba apung yang ada di daerah tersebut yang bisa berdampak

pada penurunan kualitas dan kuantitas air sungai.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif maksudnya adalah uraian yang dituangkan dalam data dengan tidak menggunakan angka-angka. Karena seluruh data yang diperoleh baik secara wawancara, observasi maupun dokumentasi akan dimasukkan kedalam pola, kategori, fokus atau tema tertentu yang sesuai, dengan terlebih dahulu di rangkum. Diiktisarkan atau diseleksi.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Lokasi penelitian ini sengaja dipilih karena pertimbangan situasi dan kondisi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang penulis teliti yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

a. Populasi

Menurut Sugiyono (1998:25) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (1998:57) bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara cara pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu apabila pemilihan sampel berdasarkan karakteristik atau

ciri-ciri tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Dengan menentukan sejumlah populasi tertentu yang dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi sebagai responden penelitian. Cara ini dipilih untuk efisiensi kerja penulis dalam mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap Daerah Aliran Sungai

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar juga memiliki fungsi yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup
- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan
- d. Memberikan rekomendasi dan atau Ramah Lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup
- f. Penyusunan rencana kerja
- g. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati Kampar

Dalam organisasi, gagasan konsep organisasi ialah koordinasi usaha untuk saling membantu, namun agar koordinasi itu bermanfaat harus ada tujuan yang hendak dicapai, dan kata sepakat mengenai tujuan itu. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan

yang dilaksanakan yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Jadi efisiensi pekerjaan pemerintah dapat dilakukan apabila aparatur pemerintahnya dapat melaksanakan pekerjaannya menggunakan sarana manajemen (*tool of management*) bagi kelancaran tugas agar lebih efisien (Sarwoto; 1987:25).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam mengelola dan melestarikan daerah aliran sungai, memerlukan setidaknya ada empat hal yang merupakan prinsip pokok dalam manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pekerjaan, dan pengawasan. Prinsip-prinsip pokok itu harus dilakukan dengan melibatkan organ-organ dalam organisasi.

1. Perencanaan Kegiatan BLH Kab. Kampar Terhadap DAS

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan bersifat mutlak bagi pelaksanaan manajemen yang baik. Perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dalam

pelestarian daerah aliran sungai ini tidak lepas dari wujud perencanaan yang nyata dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Pada tahap perencanaan yang nyata ini keterlibatan para instansi terkait tidak bisa dilepaskan, karena setiap instansi mempunyai perannya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peranan instansi terkait dalam mengelola dan melestarikan daerah aliran sungai.

Sesuai dengan visi misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki visi yaitu Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Adapun Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Kemampuan aparatur serta Prasarana dan Sarana dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan pernyataan Visi dan Misi tersebut maka diharapkan kepada seluruh aparatur atau pegawai dapat melaksanakan visi misi tersebut dan mengetahui program-program serta hasil yang akan diperoleh oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Adapun kewenangan Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Bidang Pemantauan Lingkungan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pengujian sampel secara priodik tentang baku mutu air sungai
2. Menetapkan kelas kualitas sungai
3. Hasil dari uji sampel direkomendasikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Berikut ini adalah perencanaan yang direncanakan dalam pengelolaan, pengendalian dan pelestarian DAS:

1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Kegiatan: Pencemaran yang dilakukan perusahaan
2. Bidang Pemantauan Lingkungan
Kegiatan: Pencemaran yang dilakukan masyarakat

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa setiap bidang diberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

2. Organisasi BLH Kab. Kampar

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama (Syamsir Torang 2013:25). Organisasi merupakan alat, dan wadah tempat seorang pemimpin melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa apabila organisasi baik, maka tujuan dari organisasi tersebut akan baik dan relatif mudah untuk dicapai.

Stoner dan Wankel (1986:170), menguraikan lima tindakan yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian, yaitu:

1. Menyusun pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan
2. Membagi kerja
3. Pengelompokan pekerjaan atau tugas
4. Menetapkan mekanisme kerja, dan
5. Memonitor dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan maksud mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.

Menurut Dharma Setyawan Salam (2004:19) ada beberapa tahap dalam proses pengorganisasian, yaitu:

1. Penentuan kegiatan
Penentuan kegiatan adalah seorang pemimpin harus mengetahui dan merumuskan kegiatan yang diperlukan serta menyusun daftar kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pengelompokan kegiatan
Pengelompokan kegiatan yang dimaksud ialah dengan harus mengelompokkan kegiatan atas dasar tujuan yang sama, hal ini berdasarkan atas dasar proses

atau peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan.

Urusan dalam Pengelolaan, Pengendalian dan Pelestarian DAS melibatkan beberapa bidang organisasi BLH selain organisasi pengurus/pengelola juga melibatkan semua yang terkait dalam kelestarian sungai, seperti masyarakat, perusahaan dan juga DPRD Kabupaten Kampar.

Setiap organisasi tersebut memiliki peran untuk terwujudnya tujuan dari pelestarian fungsi sungai dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari pencemaran orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Berikut ini adalah perencanaan yang direncanakan BLH Kab. Kampar dalam pengelolaan, pengendalian dan pelestarian DAS :

1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Program:
Pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup
 - b. Kegiatan:
Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup
 - c. Waktu Pelaksanaan:
4x /tahun
2. Bidang Pemantauan Lingkungan
 - a. Program:
Perlindungan dan konservasi sumber daya air
 - b. Kegiatan:
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 - c. Waktu Pelaksanaan:
2x /tahun

Dalam hal keorganisasian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah melakukan

upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

3. Implementasi Pekerjaan BLH Kab. Kampar

Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu dengan implementasi seluruh perencanaan dan diorganisasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik melainkan juga bergantung kepada pengimplementasikan perencanaan yang telah ada oleh kelompok organisasi.

Berbicara mengenai implementasi, tidak lepas dari pengaruh dari kebijakan yang telah ada. Implementasi adalah suatu tindakan/pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Karena tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada perencanaan, dan pengorganisasian yang baik melainkan juga tergantung kepada implementasi dari perencanaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, yaitu :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan hidup.

4. Pengawasan

Kontrol adalah kunci dalam manajemen. Walaupun pendelegasian adalah hal yang mutlak dalam organisasi, tetapi pendelegasian bukan berarti menyerahkan segala urusan tanpa kendali. Begitupun orang-orang dalam organisasi, seburuk-buruknya sistem manajemen jika ada kontrol dan umpan balik yang rutin dilakukan maka hasilnya masih dapat diterima.

Menurut Siagian (1991:176) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana '*controlling*' dilaksanakan oleh organisasi. Hal tersebut diperkuat oleh Murdick dan Ross (1983:176) yang mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya ruang organisasi.

Pelaksanaan pengawasan secara internal terhadap pengelolaan, pengendalian dan pelestarian DAS, dalam konteks ini pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, yaitu :

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kampar dibidang lingkungan hidup. Uraian tugas dari kepala badan yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan di bidang pembangunan, lingkungan hidup
- c. Memberikan pelayanan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di bidang lingkungan hidup
- d. Melakukan pemberian legalitas perizinan di bidang lingkungan hidup
- e. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap lingkungan hidup. Teknis perundang-undangan yang berlaku
- f. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan organisasi, perencanaan dan ketatalaksanaan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Melakukan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Sementara pelaksanaan pengawasan penganggaran secara eksternal terhadap pengelolaan, pengendalian dan pelestarian DAS, dalam konteks ini pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh :

1. BPK
2. BPKP
3. Inspektorat

Pengawasan eksternal pengelolaan pengelolaan dan pelestarian daerah aliran sungai juga dilakukan oleh anggota DPRD, karena pengawasan merupakan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

B. Faktor-Faktor Penghambat Tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap Daerah Aliran Sungai

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara keseluruhan dalam pelaksanaan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terhadap daerah aliran sungai tersebut masih terdapat berbagai kendala-kendala atau hambatan yang ditemukan dilapangan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengelolaan dan pelestarian daerah aliran sungai tersebut tentu saja menghadapi sejumlah persoalan yang mengganggu dan menghambat pelestarian fungsi sungai, walau terdapat sejumlah persoalan yang mengganggu atau menghambat tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengendalian, pengelolaan dan pelestarian daerah aliran sungai, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tetap berkeinginan menuntaskan permasalahan yang terus terjadi sesegera mungkin.:

Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sungai dalam rangka pelestarian fungsi sungai.
2. Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk operasional pembinaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka kegiatan pelestarian sungai.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian dan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan
Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa setiap bidang diberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
2. Tahap Pengorganisasian
Dalam hal keorganisasian untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
3. Tahap Pekerjaan
Dalam tahap pekerjaan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, sekretaris sangat berperan dan menerima petunjuk dan arahan dari Kepala untuk memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing para pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib.
4. Tahap Pengawasan
 - a. Internal

Pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi bidang yang mengelola pelestarian daerah aliran sungai dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

b. Eksternal

Dalam hal pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi BLH termasuk tugas pokok dan fungsi bidang yang mengelola pelestarian daerah aliran sungai dilakukan oleh 3 (tiga) instansi yaitu, BPK, BPKP, dan Inspektorat. Selain itu Pengawasan eksternal pengelolaan pengelolaan dan pelestarian daerah aliran sungai juga dilakukan oleh anggota DPRD, karena pengawasan merupakan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan fungsi pengawasan

Dari hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terhadap daerah aliran sungai Tahun 2013 yaitu :

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Badan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sungai dalam rangka pelestarian fungsi sungai.
5. Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk operasional pembinaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka kegiatan pelestarian sungai.

6. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
7. Tingginya potensi pencemaran akibat buangan limbah cair industri dan aktivitas masyarakat.
8. Banyaknya degradasi alam.
9. Kurangnya sarana dan prasarana operasional pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. ***Manajemen Pemerintahan Daerah***. Graha Ilmu, Yogyakarta
- E. Kast, Fremont dan James E. Rosenzweig. 1995. ***Organisasi dan Manajemen***, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, 2001. ***Manajemen Sumber Daya Manusia***, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis Hari dan Huseini Martini, 1998. ***Teori Organisasi***, Pusat-pusat antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia.
- Mahyadi, 1998. ***Organisasi, Teori, Struktur dan Proses***, Departemen P&K, Jakarta.
- Moekijat, 1997. ***Manajemen Kepegawaian***, Penerbit Alumni, Bandung.
- _____. 1986. ***Pengembangan Organisasi***, Penerbit CV Remadja Karya, Bandung
- Moenir, 1992. ***Manajemen Pelayanan Umum di***

- Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Musanef, 1990. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta
- Siagian, S.P, 1991. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Politik*, Penerbit CV Haji Mas Agung, Jakarta.
- , S.P, 1989. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Penerbit CV Haji Mas Agung, Jakarta.
- Syafiee, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta
- Winardi, 1999, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Daerah 06 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.